

Judul-judul penerbitan tahap pertama
SERI PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA

1. **SERANGAN UMUM 1 MARET,**
pertempuran yang membelokkan jalannya sejarah yang mula-mula sudah digariskan oleh penjajah!
2. **BANDUNG LAUTAN API,**
tidak sekadar tentang lahirnya lagu Hallo-Hallo Bandung, tetapi melukiskan patriotisme putera-puteri bangsa di kota Bandung dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan.
3. **PERTEMPURAN PALAGAN - AMBARAWA**
melukiskan heroisme para pejuang bangsa dalam upaya menegakkan kemerdekaan tanah air tercinta.
4. **PERTEMPURAN 5 HARI DI SEMARANG**
sekali lagi, putera-puteri terbaik bangsa mendharma-bhaktikan jiwa raga mereka demi mewariskan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang.
5. **AKSI MILITER BELANDA**
penjajah kembali ingin menanamkan kuku-kuku kekuasaan mereka, tetapi dalam dua kali aksi militernya, mereka terpaksa menelan kepahitan karena bambu runcing dan tekad merdeka dapat mengalahkan persenjataan penjajah yang modern.

Disusul dengan judul-judul yang menggugah semangat anak-anak kita untuk semakin cinta Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan teknis, judul-judul tidak diterbitkan seperti nomor urut di atas. Semua disajikan dengan ilustrasi indah dan menarik yang merupakan ciri khas **PUSTAKA KARTINI**

Buku-buku ini bukan sekadar indah untuk dijadikan koleksi, melainkan juga memikat dan bermanfaat besar bagi anak-anak. Juga membantu dalam belajar P.S.P.B.

PUSTAKA KARTINI sudah dikenal dan ini merupakan jaminan mutu.

Penerbit:
PUSTAKA KARTINI

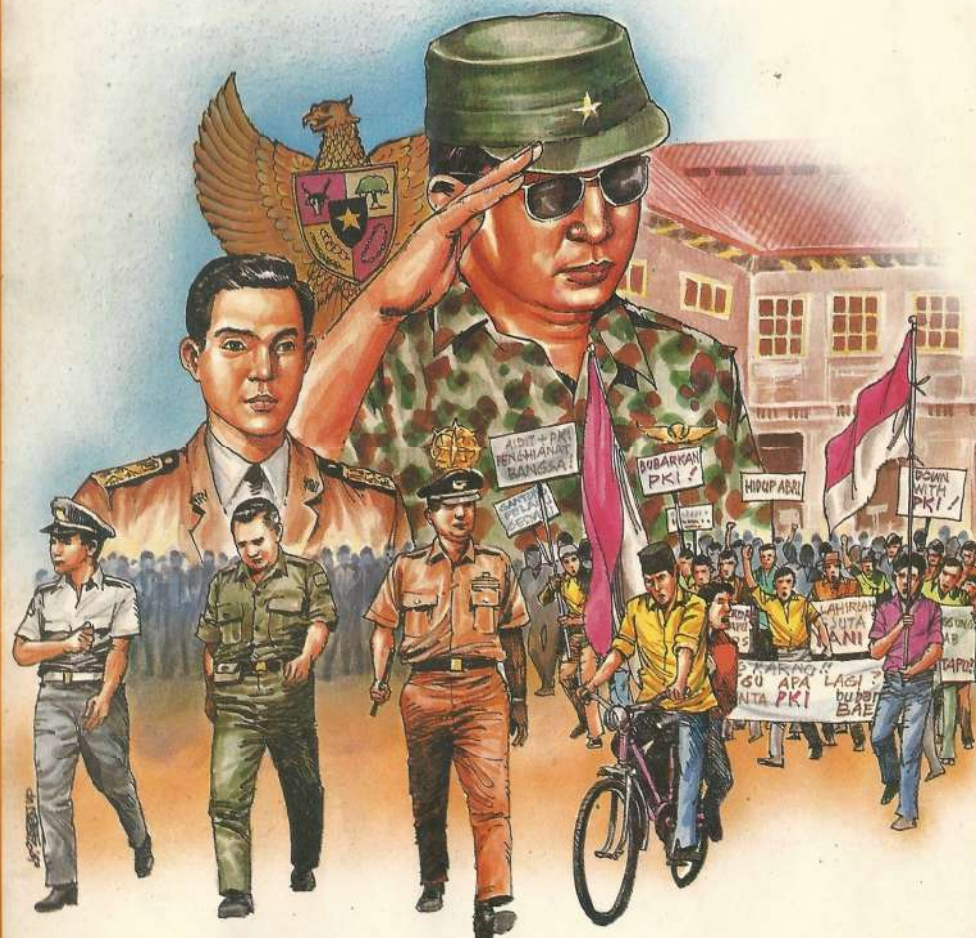
Jl. Garuda 78.
Jakarta 10620.

ISBN. 979-454-017-X



Deddy Armand

SEJARAH ORDE BARU



SEJARAH ORDE BARU

Seri Hari Nasional Indonesia

SEJARAH ORDE BARU

Cetakan pertama, Maret 1988

Deddy Armand

Gambar sampul & dalam: D.N. Koestolo

Penerbit: **PUSTAKA KARTINI**

Jalan Garuda No.78

JAKARTA 10620

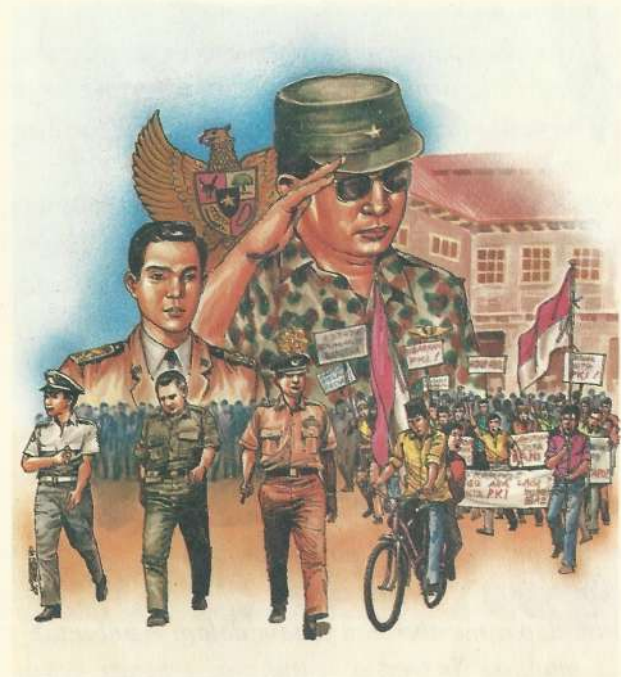
Anggota IKAPI

ISBN: 979-454-017-X

Percetakan PT Garuda Metropolitan Press

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

SEJARAH ORDE BARU



Diceritakan kembali oleh: Deddy Armand
Digambar oleh: D.N. Koestolo



PUSTAKA KARTINI

Dari Penerbit

Kita menyadari akan adanya jarak waktu yang merupakan jurang pemisah antara para remaja kita dengan suasana masa perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita ini.

Jarak ini memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap kadar patriotisme dan kesadaran serta kebanggaan berbangsa dalam diri sebagian besar remaja kita.

Kita juga menyadari akan perlunya mempersiapkan generasi muda yang tangguh untuk mewarisi kemerdekaan ini, sebagai penerima tongkat estafet yang mampu berpacu menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat, sejak dini.

Dalam kesadaran inilah kita merasakan pula perlunya kita menjembatani jarak yang merupakan jurang pemisah itu dengan berbagai upaya. Dan salah satu upaya yang dapat kita lakukan, adalah mendekatkan mereka terhadap saat-saat bangsa berjuang, melalui bacaan.

Upaya ini sekaligus untuk mendukung Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (P.S.P.B.) yang sedang kita giatkan sekarang.

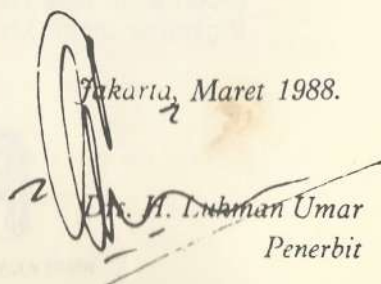
Dan dalam upaya ini pula kami terbitkan buku-buku Seri Perang Kemerdekaan Indonesia dan Seri Hari Bersejarah menyusul Seri Pahlawan Nasional yang telah kami mulai sebelumnya.

Tetap indah dan menarik dalam penampilan, dan memberikan pengembangan nilai-nilai luhur dalam penyajian.

Semoga upaya ini dapat memberikan saham dalam membentuk generasi penerus sebagai manusia Indonesia seutuhnya, generasi penerus yang pancasilais sejati.

Semoga Tuhan memberkati kita.

Jakarta, Maret 1988.


Dr. H. Lukman Umar
Penerbit



SEJARAH ORDE BARU

TAHUN 1965. Rakyat Indonesia belum menikmati kesejahteraan yang dicita-citakan, ketika ibu pertiwi menangis lagi. Kesedihan itu akibat ulah *Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)* yang kembali melakukan pengkhianatan. Mereka bermaksud menguasai dan ingin membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi komunis.

Rencana pengkhianatan itu sudah lama mereka susun. Dengan berbagai kedok dan alasan, PKI mengadakan latihan kemiliteran. Pria, wanita serta pemuda-pemudi dilatih menjadi kader komunis. Latihan-latihan itu diadakan di daerah Lubang Buaya, dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah. Pasukan pengawal presiden yang dikenal dengan nama *Cakrabirawa*, juga sudah berada dalam genggaman pengaruh PKI. Bahkan Komandan Cakrabirawa, yaitu Kolonel Untung, sudah sehati dan sejiwa dengan PKI.

Malapetaka itu menimpa bangsa Indonesia tanggal 30 September 1965. Menjelang subuh, Kolonel Untung mengarahkan pasukannya bersama pemuda-pemuda komunis yang sudah terlatih untuk melakukan pembunuhan besar-besaran.

Sasaran pertama mereka adalah pejabat-pejabat TNI Angkatan Darat. PKI menganggap bahwa Angkatan Darat merupakan penghalang paling besar bagi rencana mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.

Tanggal 1 Oktober 1965 subuh, gabungan pasukan Cakrabirawa dan pemuda-pemuda komunis menyebarkan maut. Gerombolan ini diperkuat pula oleh tiga pasukan dari kesatuan lain yang terkena bujukan serta tipu daya komunis.

Mereka mendatangi rumah Jenderal Akhmad Yani dan akan menculiknya. Akan tetapi Jenderal Akhmad Yani melawan. Karena melawan, beliau ditembak. Begitu beliau roboh, gerombolan komunis itu menyeret tubuhnya dan membawanya pergi.

Regu lain dari gerombolan komunis kemudian mendatangi Jenderal Suprpto. Beliau ditodong dan diseret pergi dalam keadaan masih mengenakan piyama. Sampai di luar, tubuh Jenderal Suprpto dilemparkan begitu saja ke dalam truk.



Jenderal S. Parman juga dijadikan sasaran. Beliau diculik dan dibawah todongan senjata, diseret dan dilemparkan ke dalam truk kemudian dibawa pergi.

Sekitar pukul empat menjelang subuh itu, Jenderal Sutoyo juga dibawa pergi dengan paksa. Seperti yang lainnya, tanpa prikemrusiaan, Jenderal Sutoyo diseret dan dilemparkan ke dalam truk, lalu dibawa pergi.

Jenderal D.I. Panjaitan, yang bertempat tinggal di Kebayoran Baru juga dijadikan sasaran kekejaman. Para penculik dan pembunuh itu melompati pagar dan masuk dengan paksa ke rumah Jenderal D.I. Panjaitan.

Dua orang kemenakan beliau mencoba menghalangi gerombolan penjahat itu. Akan tetapi kedua pemuda tersebut ditembak hingga roboh bermandi darah.

Jenderal D.I. Panjaitan sendiri langsung mereka tembak. Seperti halnya Jenderal Akhmad Yani, jenazah beliau diseret dengan keji, dilemparkan ke dalam truk lalu dibawa pergi.

Untuk menculik Jenderal Nasution, gerombolan PKI menggunakan kekuatan yang paling besar pada subuh buta itu.

Rumah Jenderal Nasution terletak bersebelahan dengan rumah Dr. J. Leimena. Waktu itu Jenderal Abdul Haris Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Waktu itu Dr. J. Leimena menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Kedua rumah itu dijaga oleh pengawal dari angkatan bersenjata. Mungkin karena kedua rumah itu dikawal dengan ketat, maka gerombolan komunis itu mengerahkan kekuatan paling besar.

Sebelum menculik Jenderal A.H. Nasution, gerombolan tersebut terlebih dahulu mengamankan situasi di rumah Dr. J. Leimena.

Karena gerombolan tersebut mengenakan seragam tentara, para pengawal yang menjaga rumah tersebut tidak menduga bahwa mereka bermaksud jahat. Mereka baru sadar setelah gerombolan tersebut menunjukkan sikap kasar dan brutal.



Para pengawal memberikan perlawanan walaupun sudah terkepung. Akan tetapi karena gerombolan penyerang jauh lebih besar, perlawanan itu dapat dipatahkan. Bahkan Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun gugur.

Setelah keadaan di rumah Dr. J. Leimena dapat dikuasai, mereka lalu menyerbu rumah Jenderal Nasution. Dalam penyerbuan itu, Ade Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Nasution yang baru berusia lima tahun, ditembak oleh para penculik.

Gadis kecil tanpa dosa itu kembali ke pangkuan ibu pertiwi sebagai perisai ayahnya, perisai keselamatan bangsanya.

Ajudan Jenderal Nasution, yaitu Letnan Satu Pierre Tende-an, malam itu tidur di *pavilyun* rumah Jenderal Nasution. Mendengar keributan tersebut, dia terbangun dan langsung meraih senjata dan dengan gagah berani melompat ke luar!

Begitu dia sampai di luar langsung disergap! Para penculik mengira dia adalah Jenderal Nasution. Pierre Tende-an membiarkan saja dirinya disergap. Bagi prajurit teladan ini, keselamatan atasannya jauh lebih penting dari dirinya.

Semua korban yang dibawa oleh para penculik itu diangkut dan dikumpulkan di markas mereka di Lubang Buaya. Korban-korban yang masih hidup, dianiaya secara kejam di luar batas perikemanusiaan. Setelah itu barulah dibunuh! Sungguh kejam.

Pierre Tende-an merelakan dirinya diseret dan diperintahkan tiarap di bak truk, lalu dibawa pergi.

Sementara itu Jenderal Nasution sendiri dapat meloloskan diri. Beliau melompati tembok pagar rumah dan jatuh di luar pagar. Karena terjatuh, kaki beliau terkilir, karena tembok itu memang tinggi.

Jenazah dari putra-putri terbaik pertiwi yang telah gugur sebelumnya, diperlakukan dengan keji dan dirusak habis-habisan.

Setelah mereka puas dengan menyiksa para jenderal, membunuh dan merusak jenazah sambil bergembira serta bernyanyi, mereka melemparkan para korban ke dalam sumur sempit. Sumur itu kemudian mereka timbun dengan tanah, batang-batang pohon pisang dan lain-lain.



Ketika peristiwa berdarah ini terjadi, Mayor Jenderal Suharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau KOSTRAD.

Mayor Jenderal Suharto biasanya selalu mewakili Jenderal Akhmad Yani sebagai pimpinan Angkatan Darat, bila Jenderal Akhmad Yani berhalangan.

Sekalipun beliau berpangkat mayor jenderal dan menduduki jabatan penting, Suharto tetap akrab dengan rakyat dan masyarakat. Sebagai warga biasa, beliau bahkan bersedia menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Mashuri, S.H. sebagai sekretarisnya.



Pagi-pagi sekali, Mashuri, S.H. sebagai sekretaris dan warga RT lainnya melaporkan peristiwa penculikan tersebut kepada Mayor Jenderal Suharto, yang segera melakukan pengecekan. Ternyata berita itu benar.

Tanpa membuang-buang waktu, beliau segera mengenakan pakaian dinas dan langsung berangkat ke Markas Besar KOSTRAD. Markas itu terletak di Jalan Merdeka Timur, Jakarta.



Sementara itu, keadaan masih belum menentu. Situasi masih membingungkan. Belum jelas; siapa kawan, siapa lawan!

Waktu itu, di lapangan Monumen Nasional (Monas), terdapat satu batalyon dari Divisi Brawijaya dan satu batalyon dari Divisi Diponegoro. Kedua batalyon tersebut dalam keadaan siaga.

Kedua batalyon tentara ini telah tertipu dan diperalat oleh PKI. Saat itu, mereka sedang menunggu perintah dari Kolonel Untung.

RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi sudah berada di bawah kekuasaan pemberontak komunis. Kolonel Untung membacakan pengumumannya berulang-ulang di corong radio.

Dalam pengumumannya itu, Kolonel Untung menyatakan terbentuknya Dewan Revolusi di bawah pimpinannya. Juga dikatakan Dewan Revolusi telah mengambil kekuasaan tertinggi negara. Dia juga mengumumkan bahwa pangkat jenderal dihapuskan, dan pangkat tertinggi adalah kolonel.

Kolonel Untung juga menjelaskan Presiden Sukarno berada di bawah perlindungan Gerakan 30 September.

Sejak mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Kolonel Untung itu, Mayor Jenderal Suharto sudah mengambil kesimpulan: PKI berada di belakang gerakan tersebut.

Panglima KOSTRAD, Mayor Jenderal Suharto, tidak segera mengambil tindakan militer. Beliau membiarkan Kolonel Untung terus mengeluarkan pengumuman-pengumumannya. Tujuannya agar rakyat mengetahui dengan jelas bahwa jenderal-jenderal yang diculik adalah jenderal-jenderal Angkatan Darat. Peristiwa itu bukan sekadar urusan dalam tubuh Angkatan Darat, tapi merupakan masalah nasional.

Mayor Jenderal Suharto menghubungi Panglima Komando Daerah Militer V/Jayakarta, yaitu Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah. Pangdam V/Jaya itu sendiri sudah mengetahui peristiwa tersebut. Beliau sudah memerintahkan seluruh garnisun ibukota untuk bersiaga penuh. Jalan-jalan ke luar Jakarta sudah tertutup.



Mayor Jenderal Suharto juga menghubungi para panglima semua angkatan bersenjata. Ternyata, Panglima Angkatan Udara, Laksamana Udara Umar Dani, berpihak pada Gerakan 30 September. Akan tetapi panglima-panglima angkatan lainnya berdiri di belakang kepemimpinan Mayor Jenderal Suharto.

Brigadir Jenderal Sabirin Mokhtar dan Kolonel Ali Murtopo ditugaskan untuk menyadarkan pasukan-pasukan Bra Wijaya dan Diponegoro yang berada di lapangan Monas. Usaha tersebut berhasil sekalipun tidak seluruhnya.

Hampir semua personil mematuhi perintah tersebut. Hanya satu kompi yang melarikan diri dan bergabung dengan pasukan pemberontak yang bermarkas di kompleks Halim Perdana Kusumah.

Kekuatan sudah tersusun. Sekarang siapa kawan, siapa lawan, sudah jelas. Mayor Jenderal Suharto lalu mengeluarkan perintah supaya semua pasukan siap di tempat serta menunggu komando.

Jam 19.00 malam, pada tanggal 1 Oktober 1965 itu, Panglima KOSTRAD memberikan perintah kepada Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, untuk merebut kembali RRI dan Gedung Telekomunikasi.

Pasukan RPKAD yang sudah terkenal keberanian dan kehebatannya itu ternyata ditakuti oleh pemberontak. Perebutan kedua gedung itu berjalan lancar tanpa harus menumpahkan darah.

Untuk memulihkan keamanan, selain mendatangkan pasukan RPKAD, KOSTRAD mendatangkan pasukan *Kujang* dan Kavaleri dari Bandung.

Pasukan RPKAD sekarang diganti namanya menjadi *Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat* (KOPASUS AD).

Langkah berikutnya adalah membersihkan kompleks Pangkalan Udara Halim perdana Kusumah dari pemberontak yang bermarkas di sana. Karena Presiden Sukarno berada di sana, dikelilingi oleh para pemberontak, demi keselamatan beliau, maka Presiden Sukarno diminta untuk meninggalkan tempat itu.



Presiden Sukarno segera meninggalkan Halim. Sementara itu Umar Dani berusaha menghalangi rencana penyerbuan Mayor Jenderal Suharto ke Halim. Panglima Angkatan Udara itu menaiki pesawat dan mengemudikannya sendiri. Dia membawa pesawatnya terbang rendah, mengancam dan menakut-nakuti Panglima KOSTRAD.

Gertakan itu sama sekali tidak menggoyahkan keputusan dan sikap tegas Mayor Jenderal Suharto.



Begitu subuh menyibak bumi, Halim Perdana Kusumah diserbu oleh pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo setelah pengepungan dilakukan beberapa saat sebelumnya.

Pertempuran sesama putra bangsa tidak dapat dihindarkan. Bagaimanapun, bumi pertiwi harus dibebaskan dari gerombolan pemberontak yang menginjak-injak Pancasila.



Setelah pertempuran berlangsung beberapa jam, markas besar para pemberontak di Halim dapat diduduki. Para pemimpin pemberontak sudah terlebih dahulu meloloskan diri. Di antara yang lari itu adalah Dipa Nusantara Aidit dan Kolonel Untung, yang menamakan dirinya pimpinan Dewan Revolusi.

Di Jawa Barat, sejumlah anak buah Untung dan Pemuda Rakyat membongkar gudang senjata di Cimahi. Akan tetapi rencana mereka segera dapat ditumpas dan keamanan di Jawa Barat dapat dikuasai.

Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, keadaan cukup rawan. PKI sudah sempat mendirikan Dewan Revolusi. RRI Semarang dan Markas KODAM VII/Diponegoro telah dikuasai oleh para perwira TNI Angkatan Darat yang sudah termanakan ajaran komunis.

Panglima KODAM VII/Diponegoro sendiri berhasil menyelamatkan diri dari sergapan para pemberontak itu.



Di Yogyakarta, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono gugur setelah diculik dan kemudian dianiaya dan dibunuh oleh pemberontak secara kejam.

Di Jawa Timur, Gerakan 30 September itu tidak mendapat angin. Kaum komunis yang mencoba menyebarkan pengaruh, mendapat perlawanan dari rakyat.

Satu-satuan RPKAD dan satu-satuan Angkatan Bersenjata lainnya bertindak dengan cepat untuk menguasai dan mengamankan daerah-daerah yang rawan.

Dalam waktu yang tidak lama, keamanan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat dipulihkan.

Kenyataan ini sangat bertentangan dengan kesombongan dan keangkuhan D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia. Sebelumnya, dia sempat bergembar-gembor Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan pusat kekuatan PKI. Dia mengumandangkan bahwa rakyat Jawa Tengah dan Jawa Timur berdiri dibawah panji-panji komunis.

Akan tetapi akhirnya dia sendiri tewas setelah diburu-buru tanpa mendapat perlindungan rakyat yang sebelumnya dia katakan sebagai pendukungnya.



Di Jakarta sendiri terjadi perkembangan yang memberikan titik terang untuk mengetahui nasib para jenderal yang diculik itu.

Dari sekian banyak korban penculikan dan keganasan PKI, yang disekap dan dianiaya untuk kemudian dibunuh, masih ada yang berhasil menyelamatkan diri dan lolos, yaitu Brigadir Polisi Sukitman.

Dia merupakan saksi hidup dari kebiadaban PKI di Lubang Buaya. Sukitmanlah yang memberikan petunjuk di mana korban-korban kebiadaban PKI itu dikuburkan.

Berkat petunjuk Sukitman, penggalan terhadap jenazah-jenazah itu dilakukan pada pagi hari tanggal 4 Oktober 1965. Penggalan itu dipimpin sendiri oleh Mayor Jenderal Suharto. Keadaan jenazah itu sudah sangat menyedihkan serta membusuk.

Keesokan harinya, semua jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kebesaran militer. Hari pemakaman para Pahlawan Revolusi itu dinyatakan sebagai hari berkabung nasional. Langit mendung sebagai pertanda bahwa ibu pertiwi tengah berduka cita. Bahkan gerimis turun di beberapa tempat.

Di sepanjang jalan menuju ke pemakaman, ratusan ribu rakyat berdiri terisak menangis, melepas kepergian para putra terbaik ibu pertiwi. Melepas mereka yang gugur akibat kekejaman dan kebiadaban komunis.

Kejadian ini sangat pahit dirasakan oleh rakyat. Rakyat lalu mengharapkan ketegasan dari pemerintah terhadap tindakan komunis dengan Gerakan 30 Septemhernya itu.

Dalam sidang Kabinet Dwikora, sehari setelah pemakaman itu, tidak ada kutukan pemerintah terhadap G-30-S/-PKI. Rakyat sangat kecewa! Karena itu, rakyat kemudian membentuk barisan untuk mengganyang PKI.

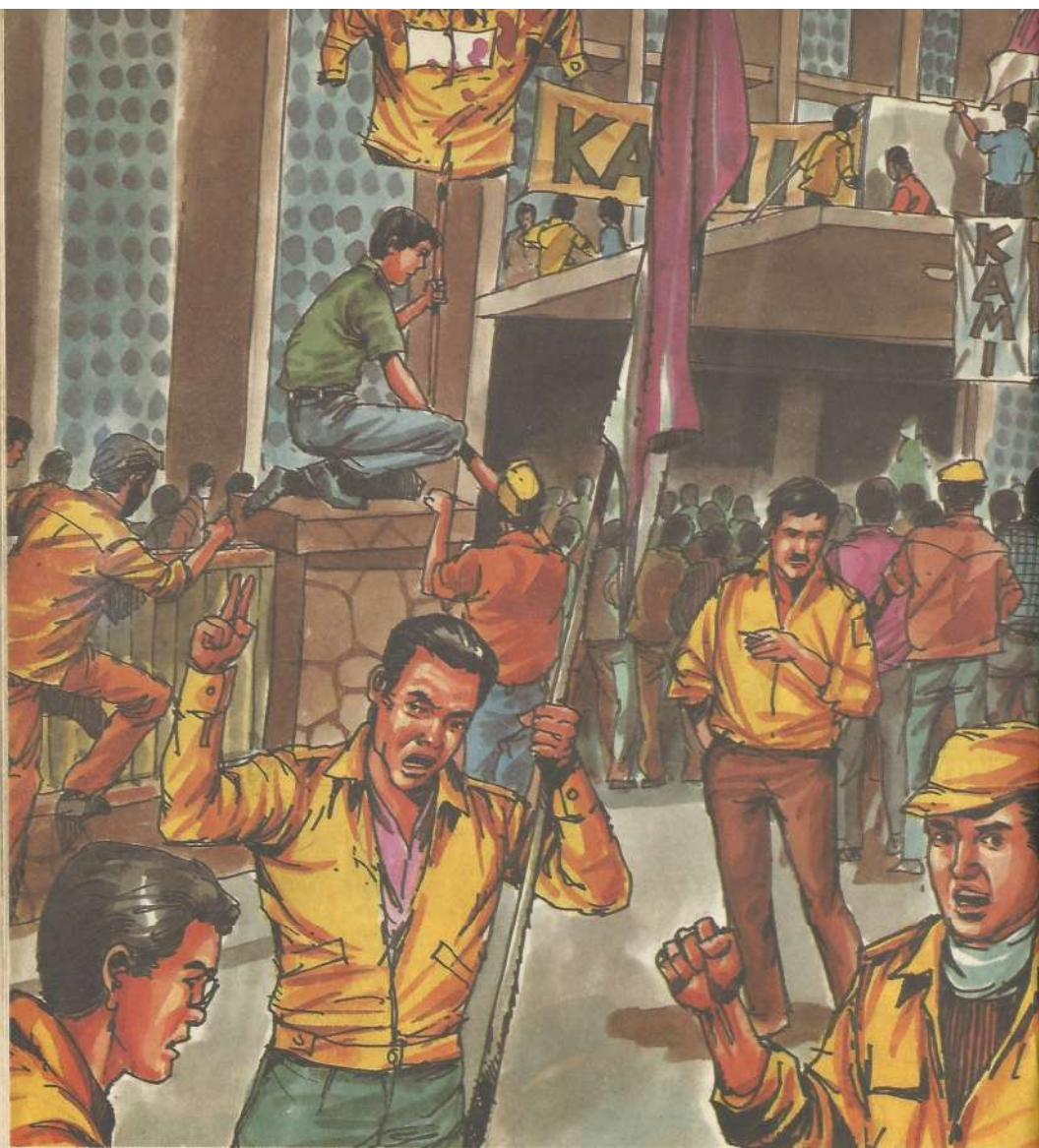
Semua kekuatan rakyat berhimpun di bawah naungan *Fron Pancasila*. Tentu saja kaum komunis tidak ikut serta dalam barisan ini.

Aksi-aksi unjuk rasa anti PKI mulai bergerak di jalan-jalan raya. Bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga di daerah-daerah. Tertangkapnya tokoh-tokoh pemberontak seperti Letnan Kolonel Latief dan Kolonel Untung tidak meredakan kemarahan rakyat.

Para mahasiswa kemudian membentuk wadah yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang disingkat dengan sebutan KAMI. Suasana di tanah air, terutama di Jakarta, semakin panas.

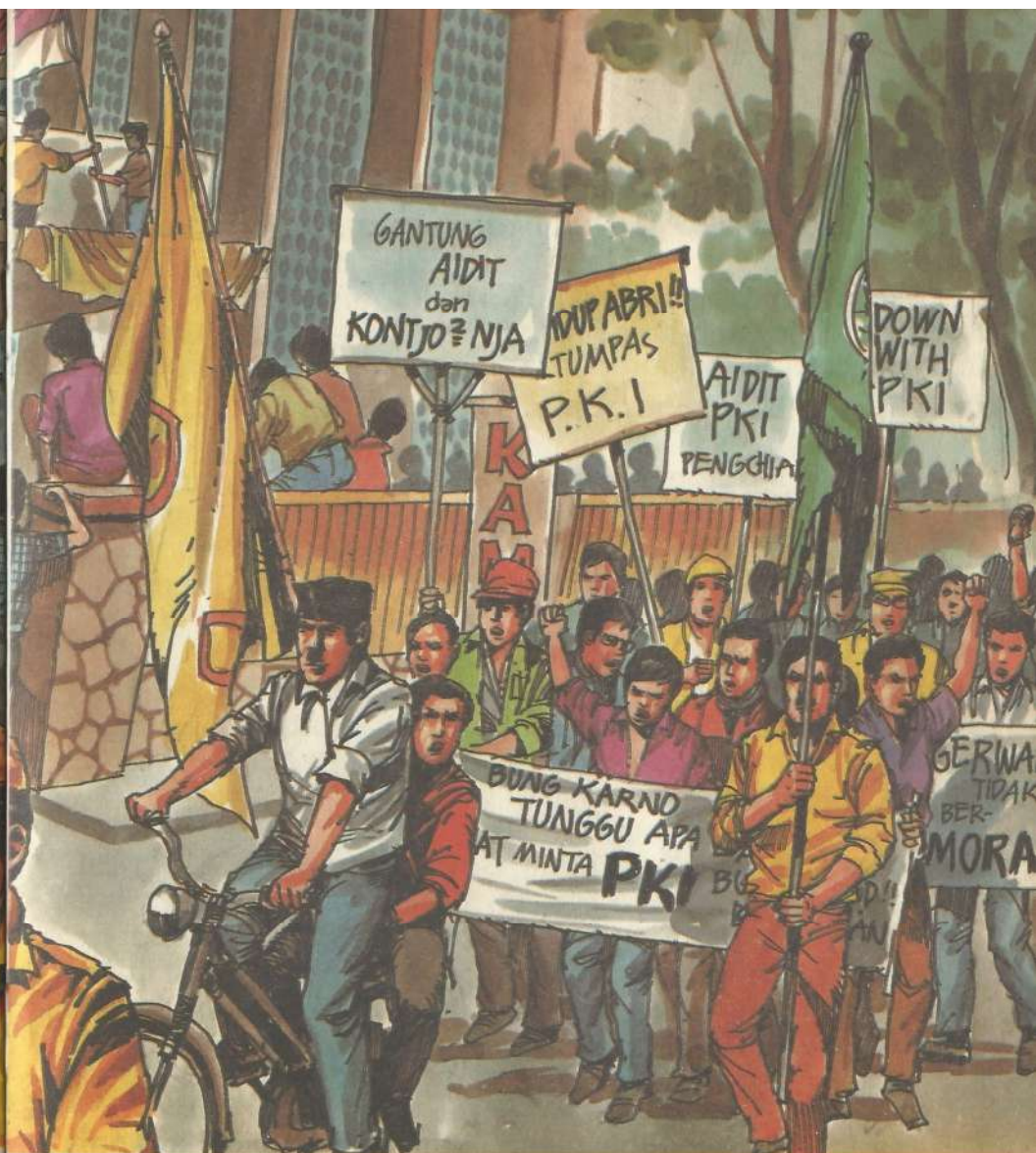


Masyarakat dan mahasiswa yang masih dirundung duka dan kecewa, menjadi semakin marah karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Pemerintah menetapkan nilai uang (*kursi*) baru. Uang bernilai seribu rupiah, nilainya sama dengan satu rupiah baru. Harga bahan bakar dinaikkan.



Mahasiswa tampil di barisan paling depan dalam memprotes semua kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu dianggap semakin menyusahkan rakyat.

Mahasiswa-mahasiswa yang selalu mengenakan jaket kuning pada waktu itu, menjadi sangat populer di kalangan



an rakyat. Mereka melakukan aksi-aksi turun ke jalan, membawa slogan-slogan. Mereka meneriakkan tiga tuntutan pokok rakyat atau Tri Tuntutan Rakyat yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *Tritura*. Mereka kemudian kelak dikenal dengan nama "Angkatan '66"

Isi Tritura itu singkat, namun tegas dan jelas:

1. *Bubarkan PKI*, 2. *Turunkan harga*, 3. *Rombak Kabinet Dwikora*.

Aksi-aksi mahasiswa semakin hari semakin memuncak. Suasana di Jakarta semakin hari semakin panas. Akan tetapi, presiden masih tetap tidak mengambil sikap tegas terhadap PKI.

Bahkan di dalam Kabinet Dwikora itu sendiri, ada beberapa menteri yang terlibat dalam kegiatan komunisme.

Subandrio yang waktu itu menjadi salah seorang Wakil Perdana Menteri justru memperburuk keadaan. Dia melakukan politik adu domba, yaitu menghasut para pemuda pengikut PNI ASU.

PNI ASU adalah singkatan dari *Partai Nasional Indonesia* yang berada di bawah pimpinan Ali Sastroamijoyo dan Ir. Surachman. PNI ASU sudah memasukkan pengaruh dan ajaran komunis.

Akibat hasutan Subandrio, para pemuda PNI ASU turun ke jalan, menghadapi aksi para mahasiswa yang memperjuangkan Tritura. Bentrokan-bentrokan keras tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi semangat para mahasiswa tidak kendor. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda PNI ASU itu justru memperkuat dan mempertebal tekad mereka.

Presiden Sukarno lalu melakukan perombakan kabinet lagi. Sayang, perombakan yang dilakukannya itu justru bertentangan dengan tuntutan rakyat dan mahasiswa.

Dalam kabinet yang baru itu, menteri-menteri yang berpihak pada Gerakan 30 September ditambah dan yang anti justru dikurangi, dan dikeluarkan dari kabinet.



Hal ini membuat para mahasiswa, pelajar dan masyarakat menjadi semakin marah. Para mahasiswa dan pelajar turun lagi ke jalan secara besar-besaran. Mereka berusaha memboikot dan mencegah pelantikan kabinet tersebut. Akibatnya, terjadi bentrokan berdarah di depan Istana Merdeka.

Pasukan yang bertugas melakukan pengawalan di sekitar istana menembak membabi buta. Seorang mahasiswa *jaket kuning* tertembak tepat di dadanya. Dia roboh terbelungkup dan gugur ke bumi pertiwi diterjang peluru prajurit yang seharusnya membela keadilan. Mahasiswa yang gugur itu bernama Arief Rakhman Hakim.

Dia jatuh menjadi tumbal perjuangan. Sejumlah rekannya luka-luka. Peristiwa itu membuat para mahasiswa semakin marah. Sementara itu, di Yogyakarta, dua pelajar juga jatuh sebagai korban dalam aksi Tritura di sana.

Suharto yang ketika itu sudah memegang berbagai jabatan dengan pangkat Letnan Jenderal, menjelaskan situasi yang sudah sangat panas itu pada presiden. Letnan Jenderal Suharto menyarankan agar PKI dibubarkan saja dan jika presiden tidak berani menanggung risiko pembubaran itu, Letnan Jenderal Suharto menyatakan kesediaannya untuk membubarkan PKI.

Akan tetapi presiden justru bersikap sebaliknya. Beliau justru meminta Letnan Jenderal Suharto membubarkan para mahasiswa. Letnan Jenderal Suharto menolak sebab cara tersebut sama sekali salah dan sama sekali tidak mungkin.

Akhirnya, Presiden Sukarno membubarkan KAMI dan Universitas Indonesia ditutup!

Aksi protes akibat pembubaran KAMI muncul di Bandung. Para mahasiswa Jakarta menggabungkan diri dalam barisan *Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia* atau KAPPI.

Keadaan semakin hari semakin tegang dan semakin panas. Para mahasiswa kemudian membentuk wadah perjuangan baru dengan nama Resimen Arief Rakhman Hakim. Sikap para mahasiswa semakin berani.



Para mahasiswa dan pelajar bertindak lebih nekad. Mereka menduduki kantor Subandrio. Kantor berita RRC dan kantor Kedutaan Besar RRC dirusak dan dibakar. Tindakan itu dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar karena mereka yakin RRC ada di belakang Gerakan 30 September itu.

Tempat-tempat yang menjadi markas orang-orang komunis seperti Gedung Pemuda, Front Nasional dan kantor Komite Central (CC) PKI diserbu para mahasiswa dan pelajar yang sudah naik pitam.

Menteri Penerangan Akhmadi melarang pemberitaan aksi-aksi mahasiswa dan pelajar itu. Maksudnya agar berita tidak meluas ke daerah-daerah dan bisa mempengaruhi para mahasiswa dan pelajar di daerah.

Akan tetapi pelajar dan mahasiswa tidak sebodoh yang diperkirakan Menteri Penerangan waktu itu. Larangan demikian justru membuat mereka semakin militan.

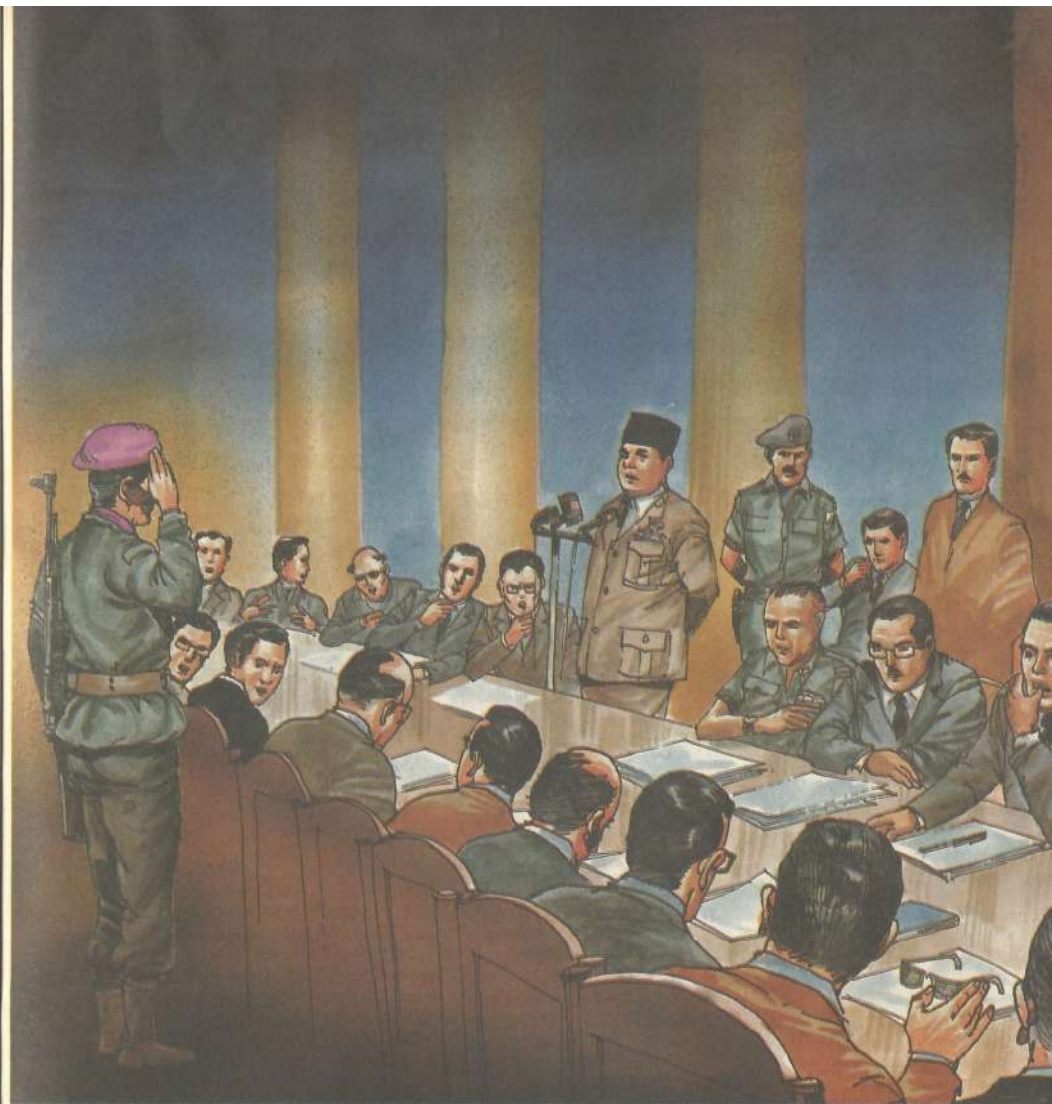
Para mahasiswa dan pelajar kemudian membangun studio-studio siaran radio darurat. Dengan siaran darurat itu mereka menyebarkan perjuangan para mahasiswa dan pelajar.

Presiden lalu memanggil wakil-wakil dari partai-partai politik dan Muhammadiyah ke istana. Mereka diperingatkan agar melarang kegiatan para pemuda, pelajar dan mahasiswa itu. Akan tetapi larangan tersebut sudah tidak mempan lagi.

Rakyat, pemuda, mahasiswa dan pelajar sudah semakin tidak menyukai keadaan waktu itu. Tekad mereka sudah bulat dan mantap untuk menuntut pembaharuan, sesuai dengan Tritura.

Karena itu, ketika di Istana Negara diadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966, rakyat, mahasiswa dan pelajar kembali turun ke jalan. Unjuk rasa kali ini sangat besar. Mereka berusaha memboikot dan membatalkan sidang kabinet tersebut.

Sementara itu, suasana dalam sidang kabinet menjadi tegang ketika seorang perwira Cakrabirawa datang menghadap. Kepada Presiden dia menyampaikan bahwa di sekitar istana muncul anggota-anggota "pasukan liar". Bahkan sebagian anggota "pasukan liar" itu masuk ke dalam kompleks istana.



Presiden Sukarno tidak menunda-nunda waktu lagi. Beliau langsung melompat ke luar dan naik helikopter. Turut bersama sejumlah menteri. Bahkan Subandrio yang ketakutan, karena terburuk-buruk menyusul, sepatunya sampai tertinggal.

Dengan helikopter, Presiden Sukarno dan sejumlah menteri langsung menuju Bogor.

Apa yang dicurigai sebagai "pasukan liar" adalah anggota KOSTRAD dan RPKAD. Mereka memang tidak mengenakan tanda-tanda kesatuan. Mereka ditugaskan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi. Salah seorang perancang gagasan ini adalah Kolonel Ali Murtopo.

Pada saat peristiwa itu terjadi, Letnan Jenderal Suharto sedang terbaring di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim 98. Beliau sedang menderita sakit tenggorokan.

Mayor Jenderal Basuki Rakhmat dan Mayor Jenderal M. Yusuf yang mengikuti sidang kabinet tersebut, segera menemui Letnan Jenderal Suharto. Brigadir Jenderal Amir Mahmud juga datang.

Dalam keadaan sakit itu, Letnan Jenderal Suharto memberikan petunjuk-petunjuk kepada ketiga perwira tinggi Angkatan Darat tersebut. Setelah itu, mereka kemudian menyusul Presiden Sukarno ke Bogor.

Ketiga perwira tinggi tersebut menghadap presiden dan membicarakan masalah yang sudah gawat dan kegentingan yang sudah sangat memuncak tersebut. Mereka juga menyampaikan kesanggupan Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Suharto untuk mengatasi situasi yang sudah sangat kalut itu.

Presiden Sukarno mau tidak mau, memang harus mengikuti kenyataan. Wibawanya sudah tidak dapat menguasai keadaan. Dalam penilaian beliau, memang hanya Angkatan Darat yang paling dapat diandalkan untuk menenangkan suasana.

Pembicaraan untuk menguasai keadaan dan pemulihan keamanan dan ketertiban pun dibicarakan. Dalam pembicaraan itu, selain Presiden Sukarno dan ketiga perwira tinggi Angkatan Darat, juga ikut serta Subandrio, Chairul Saleh dan dr. Leimena.



Setelah diadakan beberapa kali pembicaraan yang cukup tegang, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani *Surat Perintah* yang telah disusun dan dibicarakan selama berjam-jam. Pembicaraan tentang Surat Perintah ini diadakan di paviliun istana Bogor.

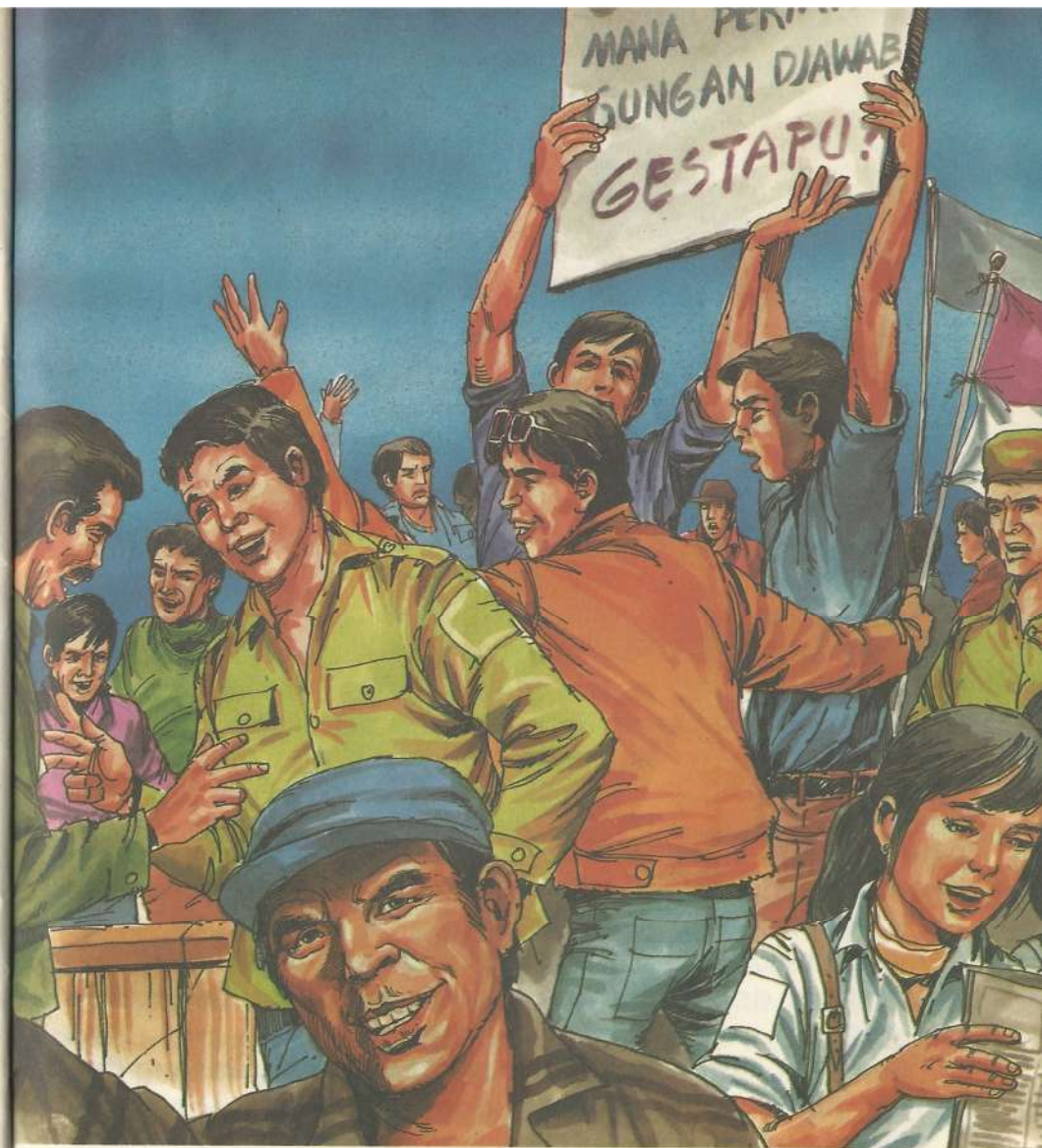
Penandatanganan itu dilakukan hampir menjelang jam sembilan malam. Setelah penandatanganan Surat Perintah tersebut, ketiga perwira tinggi itu langsung kembali ke Jakarta. Akan tetapi, ketiga perwira tinggi itu, Mayor Jenderal Basuki Rakhamat, Mayor Jenderal M. Yusuf dan Brigadir Jenderal Amir Makmud, tidak berhasil menemui Letnan Jenderal Suharto di kediaman beliau. Ternyata Letnan Jenderal Suharto berada di markas KOSTRAD, untuk memimpin rapat dengan para Panglima Angkatan di sana. Padahal waktu itu Letnan Jenderal Suharto dalam keadaan kurang sehat.

Ketiga perwira tinggi yang membawa Surat Perintah itu langsung menuju ke markas KOSTRAD untuk menyerahkan Surat Perintah itu, yang tertanggal 11 Maret 1966.

Keesokan harinya, selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau KOPKAMTIB, Letnan Jenderal Suharto menunjukkan ketegasannya terhadap PKI.

Ketegasannya itu sebenarnya mempunyai latar belakang yang jauh. Sejak tahun 1956, ketika memangku jabatan sebagai Panglima Divisi Diponegoro, sudah curiga dengan tindak tanduk PKI. Pada tahun 1956 itu, beliau sudah menyampaikan kecurigaannya pada Presiden Sukarno sewaktu presiden berkunjung ke Semarang. Akan tetapi, ketika itu Presiden Sukarno masih menaruh kepercayaan pada kesetiaan PKI terhadap Republik Indonesia.

Dengan Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Suharto membubarkan PKI serta organisasi bawahannya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, LEKRA dan lain-lainnya. Sejak itu, PKI serta organisasi-organisasi bawahannya dinyatakan sebagai partai terlarang.



Tindakan tegas tersebut disambut gembira oleh para pelajar, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Untuk mengungkapkan kegembiraan tersebut, pelajar, mahasiswa, dan ABRI mengadakan pawai kemenangan.

Tindakan-tindakan tegas Letnan Jenderal Suharto semakin tampak nyata. Menteri-menteri kabinet DWIKORA yang terlibat atau mendukung PKI, ditangkap.

Aksi-aksi turun ke jalan pun mereda. Rakyat mulai lega. Rakyat meletakkan harapan mereka di pundak Letnan Jenderal Suharto sebagai pengaman *Supersemar* (Surat Perintah Sebelas Maret).

Sementara itu, Presiden Sukarno menyempurnakan sekali lagi kabinet DWIKORA karena banyak menteri yang ditangkap.

Bersamaan dengan itu, pembersihan terhadap komunisme berlangsung terus. Anggota-anggota MPRS yang mewakili PKI serta organisasi-organisasi massa dipecat. Pergeseran-pergeseran mulai berlangsung dalam tubuh MPRS (*Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara*) dan DPR-GR (*Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong*).

KAMI mendesak agar *Supersemar* dikukuhkan sebagai ketetapan MPRS dalam sidang berikutnya. KAMI meminta agar MPRS menilai pertanggungjawaban Presiden Sukarno. Di samping itu juga diusulkan tentang peninjauan terhadap penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan itu adalah tentang penetapan Presiden seumur hidup dan tentang perlunya wakil presiden dan lain-lain.

Semua tuntutan ini berjalan menurut saluran hukum dan hampir tidak ada lagi pertentangan-pertentangan.

Negeri yang hampir porak-poranda oleh kebiadaban PKI dan ketidaktegasan pemerintah, mulai tenang. Dalam ketenangan itu, semuanya diatur dengan tata krama, dengan jalan musyawarah dan menurut hukum.

Letnan Jenderal Suharto yang mengemban Surat Perintah 11 Maret itu, menegaskan bahwa segala sesuatunya harus dijalankan secara konstitusional.



Selama ini, penyelewengan-penyelewengan terhadap undang-undang sudah banyak terjadi. Penyelewengan-penyelewengan terhadap konstitusi itu hampir saja menghancurkan negara yang dulu diperjuangkan dan dipertahankan dengan pengorbanan yang tidak kecil.

Letnan Jenderal Suharto tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh pemerintah terdahulu. Apa pun tindakan yang beliau jalankan, selalu berlandaskan konstitusi, selalu sejalan dengan undang-undang. Karena itu, semuanya berjalan lancar tanpa terjadi benturan-benturan.

Pada tanggal 17 Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum keempat. Dalam sidang itu diambil keputusan-keputusan penting, demi tegaknya demokrasi, undang-undang dan kelancaran pemerintahan.

Di antara keputusan-keputusan itu adalah pengukuhan Supersemar, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Sidang memilih Jenderal TNI Abdul Haris Nasution sebagai Ketua MPRS yang baru.

Akan tetapi, keadaan ketika itu belum dapat dikatakan beres, karena Presiden Sukarno masih memperlihatkan sikap yang tidak sejalan dengan keputusan MPRS.

Karena sikapnya itu, membuat semacam jurang pemisah dan pertentangan antara Presiden Sukarno sebagai pihak Orde Lama dengan pihak Orde Baru.

Demi keselamatan negara, pertentangan itu harus dilenyapkan. Caranya harus ditempuh jalan yang sesuai dengan konstitusi, atau sesuai undang-undang.

Perkembangan terus berlangsung. *Kebenaran memang berjalan perlahan, namun bagaimanapun, kebenaran itu pasti datang!*

Demikianlah, tahap demi tahap perkembangan terus berlangsung. Dari berbagai pihak muncul protes-protes terhadap isi pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno.

Tanggal 7 Maret 1967, diadakan Sidang Umum Istimewa MPRS. Di sini terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang cukup tajam. Suasana sidang panas. Karena itu, pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS menarik kembali mandat kepresidenan dari tangan Sukarno. Dengan perkataan lain, Sukarno diberhentikan dari jabatan sebagai presiden.

Kemudian ditetapkan Letnan Jenderal Suharto sebagai Penjabat Presiden, setelah beliau menolak ditetapkan sebagai presiden. Beliau hanya bersedia menerima jabatan sebagai presiden sementara.



Setahun kemudian, MPRS mengadakan Sidang Umum yang kelima. Sidang itu berlangsung dalam suasana yang semakin panas. Sidang makin hari makin tegang. Setiap pihak seakan-akan saling curiga mencurigai.

Akhirnya sidang berhasil mengambil keputusan: Suharto ditetapkan sebagai presiden, dan tidak lagi sebagai penjabat presiden. Setelah MPRS memutuskan jabatan presiden untuk Suharto, barulah beliau mau menerimanya.

Untuk memulihkan keadaan ekonomi dan ketenangan politik, Presiden Suharto membentuk Kabinet Pembangunan.

Kabinet ini disebut Kabinet Pembangunan I, yang menetapkan lima sasaran pokok yang disebut Pancakrida Kabinet Pembangunan I. Di antaranya ialah menyusun dan melaksanakan Pembangunan Lima Tahun tahap pertama dan melanjutkan penyempurnaan serta pembersihan aparatur negara secara menyeluruh.

Roda-roda Orde Baru mulai berjalan. Sejarah lahirnya Orde Baru cukup panjang, penuh liku dan rintangan, dan ini merupakan bagian dari kenyataan sejarah.



Sampai di mana pengetahuan dan penghayatan tentang isi buku ini? Untuk itu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Tahun berapakah PKI melakukan pemberontakan dan pengkhianatan?
2. Apa yang mereka lakukan pada pagi subuh tanggal 1 Oktober 1965?
3. Sebutkan para jenderal TNI AD dan seorang perwira pertama yang dianiaya dan dibunuh oleh PKI!
4. Sebelum memasuki rumah Jenderal A.H. Nasution, rumah siapakah yang mereka serbu? Siapakah anggota polisi yang tewas di sini?
5. Ketika peristiwa ini terjadi, apakah jabatan Mayor Jenderal Soeharto dalam kesatuannya? Apa pula jabatan beliau di lingkungan tempat tinggalnya?
6. Setelah mendapat laporan peristiwa tersebut, apa yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto? Siapakah ketika itu yang jadi Pangdam V/Jaya?
7. Siapakah yang jadi korban kebiadapan PKI di Yogyakarta?
8. Apa reaksi rakyat setelah tahu pengkhianatan PKI ini?
9. Apa singkatan dari KAMI dan KAPPI itu? Apa isi *Tritura* itu? Sebutkan!
10. Sebutkan kesatuan TNI AD yang membebaskan gedung RRI, gedung Telekomunikasi dan Halim Perdana Kusuma! Siapa komandannya?
11. Di mana Presiden Sukarno menandatangani *Surat Perintah 11 Maret* itu? Sebutkan tiga orang jenderal yang membawa surat perintah tersebut kepada Mayor Jenderal Soeharto!
12. Tindakan apa yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto!
12. Tindakan apa yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto setelah mendapat *Surat Perintah 11 Maret* itu?
13. Tanggal dan tahun berapakah Presiden Sukarno diberhentikan dari jabatan presiden oleh MPRS? Siapa kemudian yang diangkat sebagai penjabat presiden? Kapan Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden?

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya!